

**EKSISTENSI DAN PELAKSANAAN
HAK ULAYAT SUKU TOLAKI
DI KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA
(Perspektif UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya)**

Fredi Omastik¹, Rachmad Budiono², Sihabuddin³

Program Studi Magister Kenotariatan

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: frediomastik@yahoo.com

Abstract

In Indonesia, it still happens dualism with regard to agrarian law, beside applicable customary law is also applicable national law, particularly with regard to communal rights, as well as communal rights owned by communities of indigenous Tolaki tribe. This research aims to know the concrete form of regulation communal rights in the laws and regulations of Indonesia, the existence of communal rights owned by communities of indigenous Tolaki tribe in Konawe, Southeast Sulawesi Province by using empirical methods. Based on the analysis and studies have been known that communal rights owned by communities of indigenous Tolaki tribes as stipulated in Article 3 of the Basic Agrarian Law (BAL), but in fact there are social change and national interests of state that influence the existence and implementation of communal rights, so that communities of indigenous Tolaki tribes no longer entitled to the its communal rights.

Key words: *communal rights, customary law, customary law community*

Abstrak

Di Indonesia, masih terjadi dualisme berkaitan dengan hukum agraria, disamping berlaku hukum adat juga berlaku hukum nasional, khususnya berkaitan dengan hak ulayat, demikian pula dengan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki. Penulisan ini bertujuan untuk untuk mengetahui secara konkrit bentuk pengaturan hak ulayat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, eksistensi hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

² Pembimbing I, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

³ Pembimbing II, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

menggunakan metode empiris. Berdasarkan hasil analisis dan kajian diketahui terdapat hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA namun secara faktual terdapat perubahan sosial dan kepentingan nasional dan Negara yang turut mempengaruhi eksistensi dan pelaksanaan hak ulayat, sehingga masyarakat hukum adat Suku Tolaki tidak lagi berhak atas hak ulayat yang dimilikinya.

Kata kunci: hak ulayat, hukum adat, masyarakat hukum adat

Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan pokok manusia, yang berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat usaha dan/atau berfungsi sebagai tempat guna memenuhi kebutuhan pokok yang lain, tanah menjadi teramat penting khususnya apabila dihubungkan dengan kepentingan berbangsa dan bernegara yang wajib diselenggarakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan kesadaran akan pentingnya tanah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut, maka melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 ditetapkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Berkaitan dengan hal tersebut (tanah), kemudian makna “menguasai” diterjemahkan oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA),

Kemudian berdasarkan wewenang yang diberikan oleh UUPA kepada Negara tersebut, dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA kembali ditegaskan bahwa pemberian wewenang yang didasarkan pada hak menguasai dari Negara tersebut sebesar-besarnya guna mencapai kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Lebih jauh makna menguasai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA jo. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dalam pemberlakuannya harus tetap memperhatikan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, karena disamping hak menguasai tanah oleh Negara yang lahir dari ketentuan Pasal 2 UUPA jo. Pasal 33 ayat (3) UUD

1945, terdapat kewajiban Negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya, sepanjang kenyataannya masih ada, dan tentu sejalan pula dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemahaman terhadap ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, terdapat pembatasan wewenang Negara dalam menjalankan kekuasaannya, khususnya dalam rangka melindungi eksistensi dan pelaksanaan hak-hak masyarakat hukum adat, namun tentu harus berlandaskan pada kepentingan Nasional dan Negara dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut Pasal 18B ayat (2), kemudian lebih lanjut diterjemahkan dalam ketentuan Pasal 3 UUPA, dalam hukum pertanahan Indonesia dikenal dengan hak ulayat yang memiliki kedudukan yang berbeda dan khusus dalam konteks pelaksanaan hak menguasai dari negara atas tanah (Pasal 2 UUPA).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UUPA, Hak ulayat tetap diakui keberadaannya sebagai salah satu hak tradisional yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat hukum adat dalam perpespektif Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh pula bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Melalui perspektif UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) jo. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945) tersebut terdapat dua kepentingan besar yang diemban berkaitan dengan hak ulayat sebagai salah satu dari hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, yakni adanya kepentingan Nasional dan Negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang sama-sama memiliki peran penting dan bersifat fundamental bagi tercapainya cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan pula dengan ketentuan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, yang mengamanatkan pada Negara dan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman sebagai salah satu bentuk pengakuan dan

perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun hak asasi manusia yang dimaksud tentu bukanlah hak asasi yang bersifat mutlak, namun hak asasi yang dibatasi oleh hak publik/kepentingan umum, sehingga atas pelaksanaan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tersebut, tidak bertentangan dengan pasal-pasal lain yang terdapat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, memberikan penjelasan mengenai makna “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”, menurutnya hak ulayat diakui keberadaannya (eksistensinya) apabila memenuhi beberapa unsur, yaitu: terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; terdapat tanah hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan; terdapat tatanan hukum adat mengenai pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Seiring dengan perubahan sosial dan modernisasi eksistensi hak ulayat turut terpengaruhi sehingga pemberlakuan Pasal 3 UUPA perlu dievaluasi, demikian pula dengan masyarakat adat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, yang secara alamiah turut pula dipengaruhi oleh budaya-budaya baru yang sering kali tidak mencerminkan atas budaya luhur yang dimilikinya, pengaruh tersebut turut memicu perubahan terhadap tingkat afektifitas masyarakat hukum adat atas hukum adat yang dimilikinya, bahkan akibat pengaruh budaya baru tersebut, seringkali hukum adat yang bersifat mengikat bagi masyarakat hukum adat Suku Tolaki dinafikan/tidak diindahkan/dilanggar.

Berdasarkan latar belakang tersebut kemudian perlu dikaji dan dianalisis berkaitan dengan beberapa permasalahan yakni: Bagaimanakah eksistensi hak ulayat Suku Tolaki dan pelaksanaannya di Desa Anggoro Kecamatan Abuki dan

Desa Padangguni Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara?; Apakah masyarakat hukum adat Suku Tolaki berhak atas hak ulayat (*wutano onapo*) yang dimilikinya?

Pembahasan

Negara sebagai organisasi kekuasaan sangat erat hubungannya dengan hukum, karena menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Kekuasaan berfungsi melaksanakan ketentuan hukum, dan hukum berlaku sebaliknya yakni untuk membatasi pelaksanaan kekuasaan.⁴

Melalui perspektif berlakunya Negara hukum, diketahui terdapat dua jenis negara hukum, yakni negara hukum yang bersubstansikan *Rule of Law*, dan negara hukum yang bersubstansikan *Rechtsouveriniteit*. Negara hukum yang bersubstansikan *Rule of Law*, sebagaimana dikemukakan oleh A.V. Dicey memiliki beberapa unsur, yaitu *supremacy of law* (supremasi/kedaulatan hukum), *Equality before the law* (bersamaan kedudukan di muka hukum), dan Konstitusi yang berdasarkan hak-hak asasi.⁵

Lebih lanjut, Di dalam pelaksanaannya Indonesia sebagai negara hukum memadukan unsur-unsur yang terdapat di negara hukum yang bersubstansikan *Rule of Law* dan *Rechtsouveriniteit*, namun dengan kekhasannya yakni tidak memisahkan antara kekuasaan negara dengan agama karena dengan prinsip Negara Hukum Pancasila, Negara di mendasarkan segala sikap, tindakan dan/atau perbuatannya berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan lebih dari pada itu, diakuinya Pancasila sebagai ideologi dan sumber dari segala sumber hukum mengharuskan segala produk hukum mencerminkan terhadap apa yang dikehendaki oleh Pancasila, oleh karenanya sangat logis jika Indonesia disebut sebagai Negara hukum Pancasila tidak terkecuali terhadap persoalan bumi, air, juga termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dan dalam batas-batas tertentu juga ruang angkasa, harus dikuasai oleh Negara berdasarkan ketentuan

⁴ Darji Darmodiharjo, Shidarta, **Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 208-209.

⁵ CST. Kansil, Christine S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 322-334.

hukum yang berlaku, yang sesuai pula dengan ideologi negara Indonesia, yakni Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.⁶

Namun demikian, hukum adat keberadaannya telah lampau di Indonesia, Hilman Hadikusuma membagi sejarah hukum adat di Indonesia, menjadi beberapa masa, yakni hukum adat pada masa sebelum pengaruh budaya barat, yang terdiri atas zaman sebelum pengaruh budaya barat (zaman Malaio Polinesia, zaman Hindu, zaman Islam), masa kekuasaan VOC, masa Hindia Timur dan Inggris, masa Hindia Belanda dan masa setelah kemerdekaan.⁷

Terdapat perbedaan pemberlakuan hukum adat dari masa ke masa, baik karena pengaruh agama, maupun masuknya sistem hukum yang berbeda. Sebelum masuknya agama dan sistem hukum yang baru, hukum adat yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh faktor iklim, keadaan lingkungan, watak suatu bangsa dan/atau juga dipengaruhi oleh kepercayaan magi dan animisme.⁸

Lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang dibentuk berdasarkan hukum adat yang “*disaneer*” merupakan sebuah kemajuan bagi diakuinya hukum adat sebagai “*living law*”, sehingga karenanya undang-undang ini dielu-elukan sebagai hukum yang responsif.⁹ Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa lahirnya undang-undang tersebut bertujuan untuk menghilangkan sifat dualisme dalam hukum agraria nasional, karena hukum adat dijadikan dasar atas penyusunan hukum agraria nasional, sebagai dasar kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan dan sebagai dasar untuk memberikan kepastian.¹⁰

Sementara itu, menurut pandangan Ter Haar, hukum adat dilahirkan oleh sekelompok orang yang disebut dengan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschappen*). Di dalam pergaulan masyarakat hukum tersebut, lahirlah sebuah kesepakatan (aturan batin) atas perbuatan-perbuatan yang merugikan atau menguntungkan bagi masyarakat hukum yang mulai terikat tersebut, atas kesepakatan aturan batin tersebut kemudian lahirlah hak berupa hak mendahului, hak lebih atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang

⁶ Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Op.cit.*, hlm. 230.

⁷ Hilman Hadikusuma, **Sejarah Hukum Adat Indonesia**, Alumni Bandung, 1983, hlm. 7-9.

⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

⁹ Achmad Sodiki, **Politik Hukum Agraria**, Konstitusi Press, Jakarta, 2013, hlm. 9.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Loc.cit.*

terhadap barang, tanah, air, tanaman, kuil dan lain sebagainya. Kesepakatan dan hak tersebut wajib dijaga oleh masyarakat hukum, dan oleh karenanya mengikat, baik untuk kepentingan kekuasaan gaib yang diyakininya atau untuk memperoleh hak manfaat atas benda, tanah, air, kuil dan lain sebagainya yang dia miliki.

A. Eksistensi dan Pelaksanaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki Menurut Perspektif Teori Pluralisme Hukum

Keberadaan Suku Tolaki berdasarkan sejarah, tidak dapat dipisahkan dari *Kalo/Kalo Sara* sebagai benda yang disakralkan oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki. *Kalo/Kalo Sara* secara fisik merupakan rotan yang berbentuk lingkaran, rotan tersebut dililitkan sebanyak tiga lilitan, dan salah satu ujung dari rotan yang dililitkan disimpul dan diikat, sehingga ujung rotan tersembunyi di dalam simpul. Rotan dililitkan memutar searah jarum jam, dan salah satu yang lain dari ujung rotan dibiarkan mencuat keluar tanpa diikat dan disembunyikan dalam simpul.¹¹

Berdasarkan sejarah tersebut, maka *Kalo/Kalo Sara* merupakan simbol hukum adat, secara simbolis berfungsi sebagai alat pemersatu, dan berfungsi sebagai identitas atas golongan-golongan tertentu dalam stratafikasi sosial masyarakat hukum Suku Tolaki, disamping itu berdasarkan dari bentuk serta kenunikan *Kalo/Kalo Sara*, terdapat nilai/makna yang diyakini sebagai filosofi kehidupan yang baik bagi masyarakat Suku Tolaki, yang berfungsi untuk menyelesaikan segala konflik yang muncul di antara masyarakat hukum Suku Tolaki, menyelesaikan berbagai urusan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat Suku Tolaki.¹²

Disamping *Kalo/Kalo Sara*, dalam kehidupan sehari-hari mengedepankan prinsip kehati-hatian (*menombo*) dan prinsip pertimbangan (*meropo*), sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi dasar dari berbagai sumber hukum Adat Suku Tolaki, yakni:¹³

¹¹ Erens E. Koodoh, Abdul Alim, Bachruddin, **Hukum Adat Orang Tolaki**, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 27.

¹² *Ibid.*, hlm. 28.

¹³ *Ibid.*, hlm. 29-34.

1. *O'sapa*, merupakan ajaran yang berisi tentang ajaran perdamaian, sehingga dengan ajaran ini dilarang bagi Masyarakat Suku Tolaki, melakukan segala sesuatu yang dapat memperuncing keadaan (menimbulkan masalah).
2. *O'wua*, sebagai sumber hukum masyarakat hukum Suku Tolaki mengajarkan bahwa atas adanya perubahan ataupun tambahan yang dialami oleh manusia, terdapat kewajiban yang melekat terhadap perubahan dan tambahan tersebut.
3. *Oliwi*, Sumber hukum jenis ini, merupakan sumber hukum yang didasarkan pada petuah-petuah dan pesan-pesan dari leluhur, yang harus dipatuhi baik oleh perseorangan atau sekelompok masyarakat Suku Tolaki.
4. *Kukua/Hohowi*, Merupakan sumber hukum yang mengajarkan tentang susunan keturunan. Melalui ajaran ini lahirlah aturan untuk menetapkan dan mengangkat seseorang pemimpin dan/atau toko adat berdasarkan garis keturunan dan/atau keahlian.
5. *Saasara*, Sumber hukum jenis ini mengajarkan tentang tata cara yang melahirkan aturan tentang tata cara kehidupan yang benar.
6. *Kohanu*, Sumber hukum ini mengajarkan tentang harga diri atau rasa malu, berdasarkan ajaran ini, melahirkan aturan untuk mempertahankan harga diri, dan kemampuan menghargai orang lain.

Kalo/Kalo Sara sebagai simbol dan induk dari adat Suku Tolaki/*sara owose/Sara Mbuuno Tolaki*, melahirkan beberapa adat yang terbagi dalam beberapa golongan aspek kehidupan, yakni sebagai berikut:¹⁴

1. *Sara Wanua/Sara Mombulesako*

Adat yang berlaku secara intern, maupun ekstern yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban serta fungsi, peran dan tugas Pemerintah terhadap rakyat, hubungan antara Pemerintah dan Negeri Suku Tolaki, serta hubungan antara rakyat dan rakyat.

2. *Sara Mbedulu*

Adat jenis ini mengatur tentang hubungan kekeluargaan dan persatuan, mengatur tentang hubungan antar anggota keluarga inti sebagai satuan masyarakat terkecil, hingga mengatur tentang hubungan antar

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 35-36.

golongan baik bangsawan dan non bangsawan. Termasuk sub dari adat jenis ini adalah *sara mberapu*, yakni adat yang secara khusus mengatur tentang perkawinan.

3. *Sara Mbe'ombu*

Adat jenis ini merupakan adat yang mengatur tentang pelaksanaan aktivitas keagamaan dan/atau kepercayaan, juga termasuk di dalamnya *mombado*,

4. *Sara Mandarahia*

Adalah adat yang mengatur tentang pekerjaan yang membutuhkan sebuah keahlian dan/atau ketrampilan.

5. *Sara Mbeotoro'a*

Adalah adat yang dalam kegiatan berladang (*mondau*), berkebun (*mombopaho*), berternak/megembala kerbau (*mombakani*), berburu (*melabu* dan *dumahu*), dan menangkap ikan (*meoti-oti*).

Disamping adat/kebiasaan sebagaimana digambarkan di atas, terdapat pula adat yang memiliki sanksi di dalamnya, atau kebiasaan sebagaimana digambarkan oleh Snouck Hurgronje yang kemudian disebut dengan “*Adat Recht*” yang juga terbagi dalam beberapa penggolongan aspek kehidupan, hukum adat tersebut meliputi:

1. *Sara Wonua*, adalah hukum adat di bidang pemerintahan;
2. *Sara Ine Wuta*, adalah hukum adat di bidang pertanahan;
3. *Sara Ine Tina*, adalah hukum adat di bidang perkawinan;
4. *Sara Merapu*, adalah hukum adat di bidang tata cara membangun dan membina rumah tangga;
5. *Sara Ine Petiari'a*, adalah hukum adat di bidang pewarisan;
6. *Sara Ine Pesambepe'a*, adalah hukum adat di bidang utang piutang;
7. *Sara Ine Pekakahi'a*, adalah hukum di bidang sengketa/konflik dan tata cara penyelesaiannya;
8. *Sara mbekindoro'a*, adalah hukum adat di bidang pencemaran nama baik dan mencelakakan orang lain.¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara dan sebagian dari Kabupaten Konawe Kepulauan, dahulunya merupakan sebagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Konawe, pada jaman dahulu Pemerintahan Kerajaan Konawe berpusat di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe. Kerajaan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 36-37.

Konawe terdiri dari beberapa wilayah yang tersebar luar di daerah tersebut yang dahulunya disebut dengan Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka dan Kota Kendari, daerah kekuasaan tersebut di setiap wilayah (setingkat kecamatan) dipimpin oleh *puutobu* dan di setiap kampung dipimpin oleh *toono motuo*.¹⁶

Sejak jaman dahulu, masyarakat hukum adat Suku Tolaki, dikenal sebagai masyarakat yang terbiasa dengan kehidupan bercocok tanam baik dalam bentuk ladang, sawah atau tanaman jangka panjang seperti pohon jati, pinus dan lain-lain, berternak, dan/atau berburu ikan atau binatang liar.¹⁷

Atas kebiasaan tersebut masyarakat hukum adat Suku Tolaki memiliki hubungan yang sangat erat dengan tanah, dalam bidang bercocok tanam masyarakat hukum adat Suku Tolaki dikenal memiliki kebiasaan *shifting cultivation* (bercocok tanam secara berpindah-pindah), di samping kebiasaan mengembala ternak di area tanah yang disediakan secara khusus untuk itu, di samping itu terdapat fungsi dan peran tanah bagi bagi masyarakat hukum adat Suku Tolaki, yakni:¹⁸

1. *Titi'ano obeli*, Menurut pandangan masyarakat hukum adat Suku Tolaki, tanah menjadi penting karena tanah merupakan tempat mereka dilahirkan, tumbuh dan berkembang, sejak masa kecil hingga dewasa.
2. *Tano Opa*, Terdapat kebiasaan masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki, yaitu memakamkan para leluhur mereka di tanah yang dikuasainya.
3. *Peotoro'a*, Tanah berfungsi sebagai tempat berladang (*mondu'u*), berkebun tanaman palawija (*mepombahora*), bercocok tanah padi di sawah (*megalu*), dan berfungsi sebagai tempat bercocok tanam tanaman jangka panjang seperti jati, coklat/kakau, kelapa, jambu mente dan lain-lain.
4. *Pelaika'a*, Tanah menurut fungsi ini, berfungsi sebagai tempat membangun keluarga dan kehidupan bersama, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai tempat berteduh dan berlindung. Fungsi tanah ini bagi

¹⁶ Wawancara dengan Pu`utobu, Ketua Adat Desa Padangguni Kecamatan Padangguni dan Desa Anggoro Kecamatan Abuki Kabupate Konawe, 24 April 2015.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 166.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 166-168.

masyarakat hukum adat Suku Tolaki, berfungsi pula sebagai tempat *medulu*, yakni tempat hidup bersama, baik dengan keluarga satu garis nenek moyang atau dengan kelompok lain.

5. *Pu'uno Toroaha*, Tanah menurut masyarakat hukum adat Suku Tolaki, juga berfungsi sebagai modal atau aset yang berguna untuk mengembangkan kualitas hidup, baik melalui bercocok tanam, berternak dan untuk diwariskan kepada anak cucuknya.

Berdasarkan sejarah, masyarakat hukum adat Suku Tolaki pada masa tertentu mengenal sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Suku Tolaki juga mengenal beberapa jenis tanah yakni meliputi, tanah milik raja (*wutano wonua*), tanah ulayat kampung (*wutano onapol/wutano toono dadio*) dan tanah milik perorangan (*wu laa ombuno*).¹⁹

Tanah *wutano onapol/wutano toono dadio*, dalam UUPA dikenal dengan tanah hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA, terdapat beberapa jenis tanah hak ulayat *wutano onapol/wutano toono dadio* menurut masyarakat hukum adat Suku Tolaki, yakni meliputi:²⁰

1. *Wuta Ngguuro*, yaitu tanah ulayat yang memiliki kandungan mineral yang amat tinggi, yang dijadikan bahan dasar pembuatan *o karo* (panci yang terbuat dari tanah liat)
2. *Wuta mbeanihi*, yaitu tanah ulayat yang dijadikan tempat pengambilan garam, tanah ulayat ini terletak di pesisir pantai.
3. *O'sambu* adalah tanah ulayat yang berupa hutan perawan/hutan belantara yang dikeramatkan oleh penduduk setempat karena diyakini dihuni oleh makhluk halus, namun kemudian hutan ini dapat juga dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki guna aktivitas perladangan, mengambil madu lebah (*karosoema*), mengambil dan memanfaatkan hasil hutan, yang berupa damar, rotan dan sebagainya.

Secara umum dapat diketahui jenis-jenis tanah yang dibedakan atas cara memperoleh dan jenis berdasarkan penggunaan tanah yakni meliputi:

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 169.

²⁰ *Ibid.*, hlm.172-173.

- a. *O'rawu*, Jenis tanah ini merupakan jenis tanah berupa ladang yang diolah tanpa ada jeda antara masa tanam dan panen, hingga masa tanam di masa berikutnya. Tanah ini dimanfaatkan untuk ditanami padi dan/atau palawija atau bahkan dimanfaatkan untuk ditanami tanaman jangka panjang.
- b. *Anasepu* atau *Anahoma*, Tanah hak milik perorangan ini merupakan tanah bekas ladang yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya berkisar 5 tahun hingga 9 tahun lamanya, dan kemudian diolah kembali menjadi lahan perladangan baru. Selama masa 5 tahun hingga 9 tahun tersebut, tanah dibiarkan ditumbuhi berbagai jenis tanaman, seperti bambu, semak belukar dan umbi-umbian.
- c. *Laliwata*, Merupakan salah satu dari jenis tanah hak milik perorangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, yang ditandai dengan membusuknya pohon yang ditebang pada saat pertama kali membuka tanah, penebangan tanah dilakukan sebagai bentuk tanda bahwa tanah tersebut telah dikuasai dan dimiliki oleh seseorang.
- d. *Walaka*, Tanah jenis ini merupakan tanah yang dimanfaatkan khusus untuk mengembala kerbau.
- e. *Waworaha*, Tanah jenis ini adalah tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat untuk menanam tanaman jangka panjang, seperti kelapa, pinang, durian, mangga, langsung dan lain sebagainya, di beberapa *waworaha* ditemukan juga rawa yang ditumbuhi/ditanami sagu dan kuburan nenek moyang beserta keluarganya.
- f. *O galu*, Merupakan jenis tanah persawahan yang menggunakan sistem pengairan yang tradisional atau modern.
- g. *O epe*, Merupakan tanah yang menjadi area tumbuh pohon sagu,
- h. *Arano*, Tanah jenis ini merupakan tanah dengan bentuk rawa yang dijadikan tempat menangkap ikan.
- i. *Pinokotei*, Merupakan batang sungai yang telah dijinakkan baik kedalamannya dan arusnya. Batang sungai ini digunakan untuk menangkap ikan dengan alat tangkap *bubu* yang terbuat dari anyaman bambu. namun *pinokotei* ini sifatnya temporal, karena batang sungai yang telah dijinakkan seringkali rusak karena diterjang banjir, sedangkan

diantara sungai yang bengkok dan lurus atau yang sering kali disebut *anandoko* oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, sering dimanfaatkan sebagai ladang yang ditanami tanaman palawija.

- j. *Lalohulo*, Jenis tanah ini adalah tempat tumbuhnya pohon damar. Jenis tanah ini biasanya berada di tengah hutan dan kepemilikannya dapat diwariskan.
- k. *Wuta Tiari*, Jenis tanah ini merupakan jenis tanah ladang yang diperoleh melalui pewarisan baik dari orang tua atau nenek moyang. Pada umumnya jenis tanah ini ditanami tanaman jangka panjang atau berupa lahan persawahan.
- l. *Wuta Ari Pelaikaa*, Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang digunakan untuk tempat tinggal, di tanah tersebut dibangun rumah dengan halaman dan pekarangan yang terletak di belakang rumah (*wuta ipambalaika*), di *wuta ipambalaika* tersebut ditanami tanaman palawija yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti umbi-umbian dan macam-macam sayuran, jenis tanah ini diwariskan secara turun temurun.
- m. *Wuta mbonggapalaa*, Tanah ini merupakan tanah yang dimiliki oleh seseorang yang menjabat *puutobu* dan *toono motuo*, sebagai tanah hak imbalan jabatan.

Proses menandai areal tanah/kawasan hutan yang dibuka sebagai tempat ladang (*wuta mbinotiso*) dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. *Potiso*, Adalah aktivitas menandai (*mondandai*) suatu areal tanah tertentu yang akan dijadikan lahan perladangan, dengan cara membabat sekitar areal tanah yang akan dijadikan dan kemudian diberi tanda dengan cara menancapkan sepotong kayu berukuran sedang di atas tanah yang di babat. Kegiatan *potiso* berakhir setelah jangka waktu 6 bulan, artinya jika 6 bulan setelah dilakukan *potiso* tidak dilakukan aktivitas (*monduehi*/menebang pohon besar) dan/atau (*mosalei*/membersihkan semak belukar) yang dilakukan oleh pembuka lahan, maka orang lain dapat merubut tanah yang telah dilakukan *potiso*, dan seseorang yang melakukan *potiso* tersebut tidak lagi dapat menuntut kembali tanah yang telah diterlantarkan olehnya selama 6 bulan tersebut.

- b. *Sulahi* dan *Wakasi*, ialah kegiatan lanjutan dari aktivitas menandai (*mondadandai*) lahan yang akan dijadikan ladang. *Sulahi* dan *wakasi* merupakan kegiatan membuat batas keliling areal kawasan hutan yang akan dijadikan ladang. Terdapat perbedaan antara *sulahi* dan *wakasi*, *sulahi* adalah kegiatan menandai yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki dengan cara menebang satu atau lebih pohon besar, sedangkan yang disebut *wakasi* adalah kegiatan menandai yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki dengan cara menebang rumput ilalang atau semak belukar.

Terdapat hukum adat yang berlaku bagi tanah ini (tanah ulayat kampung/*wutano onapo/wutano toono dadio*), yang mengatur kekuatan berlaku bagi tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, yakni sebagai berikut:²¹

- a. Kekuatan berlaku ke dalam atas hak ulayat (*wutano onapo/wutano toono dadio*) masyarakat hukum adat Suku Tolaki
- Hanya warga kampung yang dapat memanfaatkan tanah tersebut, namun hanya terbatas pada tanah liar yang berada di sekitar kampung/desa setempat.
 - *Puutobu* dan *toono motuo* memiliki wewenang untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat hukum adat Suku Tolaki, demikian pula dengan urusan tanah sebagai bagian dari penunjang kehidupan masyarakat hukum adat Suku Tolaki.
 - Sengketa yang terjadi di antara masyarakat hukum adat Suku Tolaki di selesaikan oleh *puutobu* dan *toono motuo*.
- b. Kekuatan berlaku ke luar atas hak ulayat (*wutano onapo/wutano toono dadio*) masyarakat hukum adat Suku Tolaki
- Tidak boleh ada pemanfaatan tanah tersebut yang dilakukan oleh warga dari kampung lain (pendatang), selain atas persetujuan/izin dari pemangku adat setempat, yakni *puutobu* dan *toono motuo*, bahkan dengan cara mengatasnamakan warga setempat dan/atau keluarga yang berada di daerah setempat tersebut. Jika hal ini

²¹ *Ibid.*, hlm. 170-171.

dilanggar maka secara adat orang yang bersangkutan akan dikenakan denda (*peohala*) berupa satu ekor kerbau, yang menurut sumber adat *o'lawi* dapat diganti oleh uang.

- Tidak boleh mengalihkan tanah dengan cara jual beli, tukar menukar yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki kepada orang selain Suku Tolaki;
- Sengketa yang terjadi di antara masyarakat hukum adat Suku Tolaki, dengan pendatang diselesaikan oleh *puutobu* dan *toono motuo*.

Secara umum tanah hak milik perorangan (*wuta laa ombuno*) dibedakan menjadi 2 macam, yakni jenis-jenis tanah yang dibedakan berdasarkan cara perolehan dan penggunaan/peruntukan. Jenis-jenis tanah yang didasarkan pada cara perolehan meliputi: *o'rawu*, *anasepulanahoma*, *laliwata*, *wuta tiari*, *wuta mbonggapala* dan jenis-jenis tanah yang didasarkan pada penggunaan/peruntukannya meliputi: *walaka*, *waworaha*, *o galu*, *o epe*, *arano*, *pinokotei*, *lalohulu*, dan *wuta ari pelaikaa*.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti (penulis), di tempat penelitian (Desa Padangguni Kecamatan Padangguni dan Desa Anggoro Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara) tidak ditemukan tanah ulayat kampung (*wutan o onapo*) jenis *wuta ngguro* dan *wuta mbeanihi*, hanya terdapat tanah ulayat kampung (*wutano onapo*) jenis *o'sambu* yang kini menjadi tanah *wuta dowo* atau tanah *wuta laa ombuno*.

Keberadaan tanah ulayat kampung (*wutano onapo*) jenis *o'sambu* tersebut, berada berbatasan dengan tanah milik raja/*wutano wonua*, yang seiring dengan runtuhnya Kerajaan Konawe dan berdirinya Negara Republik Indonesia melebur menjadi tanah Negara, yang sejak tahun 1974 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat ditetapkan sebagai daerah tujuan transmigrasi.²²

²² Wawancara dengan Bapak Pusnawir Rama, SE., dan Nasruddin, SH., MH., Pejabat Kecamatan Abuki dan Kecamatan Padangguni, 30 April s/d 1 Mei 2015.

B. Perubahan Masyarakat Hukum Adat Suku Tolaki dalam Berbagai Aspek Berkaitan dengan Tanah Ulayat Menurut Perspektif Teori Hukum dan Perubahan Sosial Teori Negara Hukum dan Tujuan Hukum

Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat Suku Tolaki merupakan sesuatu yang natural/alami, mengingat tidak dilakukan melalui pemaksaan guna mengubah kebiasaan/adat istiadat dan hukum adat yang di milikinya. Mengacu pada pandangan Arnold M. Rose, perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat Suku Tolaki, berkaitan dengan hukum adat yang dimilikinya dapat saja terjadi karena adanya kumulasi yang progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, adanya kontak atau konflik dengan kebudayaan baru dan adanya gerakan sosial (*social movement*).

Di bidang pertanian, ditemukan teknologi pengairan terasering dan teknologi produksi bibit unggul secara hibrida dan teknologi penyubur tanah (pupuk), yang turut mempengaruhi cara bercocok tanam masyarakat hukum adat Suku Tolaki yang berprofesi sebagai petani. Dengan penemuan teknologi pertanian di bidang produksi, tidak lagi ditemukan anggota masyarakat hukum adat Suku Tolaki yang bercocok tanam secara berpindah-pindah (*shifting cultivation*). Terdapat pula televisi, jaringan internet dan telepon, yang memicu masyarakat hukum adat Suku Tolaki memiliki kebutuhan lebih dibanding kebutuhan masyarakat hukum adat Suku Tolaki jaman dahulu, saat ini televisi, jaringan dan khususnya telepon merupakan kebutuhan primer yang pemenuhannya turut serta dipengaruhi oleh trend baru dan modern, penemuan baru di bidang teknologi tersebut, memaksa masyarakat hukum adat Suku Tolaki untuk mendapatkan materi lebih, sehingga terjadi perubahan sosial (gaya hidup) di kalangan masyarakat hukum adat Suku Tolaki.

Berkaitan dengan perubahan sosial yang terjadi di lingkungan sosial masyarakat hukum adat Suku Tolaki, yang disebabkan oleh adanya kebudayaan baru yang masuk dan mempengaruhi terhadap kebudayaan dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, misalnya masyarakat hukum adat Suku Tolaki telah mengenal sistem pendaftaran tanah, sehingga tidak jarang masyarakat hukum adat Suku Tolaki mendaftarkan tanah

yang dimilikinya guna menjadi tanah dengan sertifikat hak milik. Dikenal pula sistem peradilan yang bersandar pada hukum nasional, sehingga tidak jarang masyarakat hukum adat Suku Tolaki mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri guna menyelesaikan konflik yang dialaminya dan keterlibatan polisi dalam menyelesaikan sengketa yang dialaminya. Dengan dikenalnya sistem pengadilan menurut hukum nasional, jarang sekali masyarakat menggunakan *sara ine teposala'a sisala'a* (hukum adat tentang penyelesaian konflik) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat Suku Tolaki.

Sejalan pula dengan pandangan Soerjono Soekanto, menurutnya secara garis besar terdapat hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor intern, berupa pertumbuhan penduduk, meningkatnya variasi konflik yang tidak dapat/mampu diselesaikan oleh hukum adat, adanya pengaruh kebudayaan baru yang diyakini sebagai sesuatu yang lebih baik bagi masa depan masyarakat hukum adat Suku Tolaki.

Tidak dipungkiri peningkatan jumlah masyarakat hukum adat Suku Tolaki memaksa banyaknya dibutuhkan tanah guna menunjang segala aspek kehidupan masyarakat hukum adat Suku Tolaki, hal ini turut mempengaruhi kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki khususnya yang berkaitan dengan *sara mbeotoro'a* (adat yang berhubungan dengan kegiatan berladang (*mondau*), berkebun (*mombopaho*), berternak/mengembala kerbau (*mombakani*), berburu (*melabu* dan *dumahu*) dan menangkap ikan (*meoti-oti*)) dan *sara mbedulu* (adat yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, hubungan antaranggota keluarga inti, antaranggota kelompok kerabat, dan antargolongan bangsawan dan bukan bangsawan dalam rangka persatuan).

Serta dipengaruhi oleh faktor ektern, masyarakat hukum adat Suku Tolaki, dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi hanya berinteraksi dengan sesama masyarakat hukum adat Suku Tolaki, namun juga berinteraksi dengan suku-suku lain, misalnya suku Suku Bugis yang mengajarkan teknik pengairan tanah persawahan, dan Suku Jawa yang banyak membawa pengaruh hukum nasional di bidang pertanahan dan pengaruh lain.

Berkaitan dengan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, perlu diteliti dan dianalisis melalui beberapa faktor, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yakni meliputi:

1. Masyarakat Hukum Adat

Di lingkungan masyarakat hukum adat Suku Tolaki, dikenal beberapa tokoh yang memiliki peran sebagai berikut:

- *Toono motu'o* dan *puutobu* adalah orang yang dituakan yang bertugas memimpin adat di tingkat kampung atau desa;
- *Tolea* adalah seseorang yang dipercaya menjadi juru bicara dalam urusan perkawinan, misalnya dalam prosesi pra lamaran, lamaran dan menikah, juga pada saat terjadi perceraian atau jenis-jenis perkawinan yang tidak biasa;
- *Pabitara* adalah seseorang yang ditunjuk sebagai juru bicara dalam urusan adat, baik untuk urusan adat seluruh masyarakat hukum adat secara intern atau ekstern;
- *Posudo* adalah orang yang bertugas membantu tugas *Tolea* dan *Pabitara*;
- *Mbusehe* adalah seseorang yang ditunjuk sebagai kepala urusan perdamaian atas konflik antar individu atau kelompok yang terjadi di antara sesama masyarakat hukum adat Suku Tolaki atau dengan seseorang yang bukan masyarakat hukum adat Suku Tolaki;
- *Mbuakoi* adalah seseorang yang ditunjuk sebagai kepala urusan agama yang bertugas mengurus tolak bala dan pengaruh roh jahat,

Dalam perkembangannya terdapat pergeseran peran-peran tokoh yang dikenal dalam lingkungan masyarakat hukum adat Suku Tolaki, yakni sebagai berikut:

- Pada jaman dahulu dikenal *otadu* yang bertugas sebagai kepala urusan strategi pertahanan dan keamanan serta *tamalaki* yang bertugas sebagai panglima perang/hulubalang, namun seiring dengan terbentuknya

Negara Republik Indonesia, tugas tersebut diserahkan kepada Polisi dan TNI yang memiliki peran menjaga ketertiban dan keamanan;

- *Tolea* kini dilaksanakan oleh seseorang yang juga merangkap sebagai *pabitara* yang juga bertugas sebagai juru bicara dalam urusan adat;
- *Pergeseran* peran *posudo* yang pada jaman dulu bertugas melayani kerajaan saat ini bergeser melayani *tolea* dan *pabitara*;
- *Mbuakoi* yang merupakan kepala urusan keagamaan, juga merangkap sebagai *mbuowai* atau *osando* yang bertugas sebagai kepala urusan kesehatan dan pengobatan penyakit;

Selain bergeser atau hilangnya peran beberapa tokoh-tokoh yang dikenal oleh masyarakat hukum Suku Tolaki, ditemukan pula perubahan kualitas kepemimpinan *toono motuo* yang tidak lagi mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya atas segala persoalan yang terjadi di kehidupan sehari-hari masyarakat hukum adat Suku Tolaki tidak mampu pula menegakkan hukum adat khususnya atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pemangku adat atas adat dan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat hukum adat Suku Tolaki, disamping adanya konflik kepentingan atas peran, fungsi dan tanggung jawab yang diemban dengan desakan ekonomi yang juga turut menyimpannya.

Ditemukan pula putusnya proses regenerasi *puutobu* yang memiliki tugas mengawasi peran, fungsi dan pelaksanaan tugas *toono motuo*, sehingga dapat dipahami jika saat ini hanya terdapat 5 *puutobu* di seluruh tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, hal ini menyebabkan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh *puutobu* kepada *toono motuo*.

Pada saat ini di bekas kekuasaan Kerajaan Konawe tidak lagi hanya dihuni oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, namun juga dihuni oleh Suku Bali, Suku Bugis, Suku Jawa dan suku lain yang datang dalam rangka transmigrasi. Masyarakat hukum adat Suku Tolaki kini tersebar di setiap desa yang berada di Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, juga termasuk di Desa Padangguni Kecamatan

Padangguni dan Desa Anggoro Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe yang letaknya bersebelahan.

Di Desa Padangguni Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara diketahui terdapat 783 jiwa yang terdiri dari berbagai suku, dan atas 783 jiwa diketahui komposisi $\pm 25\%$ masyarakat hukum adat Suku Tolaki dan $\pm 75\%$ masyarakat non Suku Tolaki, sehingga ± 200 jiwa adalah masyarakat hukum adat Suku Tolaki.²³

Berdasarkan jumlah penduduk yang tersisa di Desa Padangguni, diketahui hanya $\pm 10\%$ dari ± 200 jiwa masyarakat hukum adat Suku Tolaki yang secara aktif mengelola dan memanfaatkan tanah yang dimilikinya, baik untuk bercocok tanam atau untuk ditanami jenis tanaman jangka panjang.

Di Anggoro Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara terdapat jumlah penduduk sebanyak 462 jiwa, dengan komposisi $\pm 1\%$ masyarakat hukum adat Suku Tolaki dan $\pm 99\%$ adalah masyarakat non Suku Tolaki (Suku Bugis).²⁴

2. Tanah Ulayat

Terdapat perubahan kepemilikan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku tolaki melalui program Nasional maupun melalui jual beli.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, diketahui dari 100% tanah yang terdapat di Desa Padangguni, $\pm 80\%$ dikuasai oleh bukan masyarakat hukum adat Suku Tolaki dan $\pm 20\%$ masih dikuasai oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki.

Tanah yang dijual tersebut tidak hanya tanah pekarangan (*wuta ipambalaika*) *wuta ari pelaikaa*, namun juga meliputi tanah persawahan (*o galu*) dan tanah *waworaha*. Selain tanah yang telah dialihkan kepemilikannya, atas tanah $\pm 20\%$ sisa tanah yang masih dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, kini $\pm 10\%$ dikuasai oleh masyarakat non Tolaki (transmigran) melalui perjanjian sewa menyewa/bagi hasil

²³ Hasil Wawancara dengan Pu`utobu, Ketua Adat, 25 - 27 April 2015.

²⁴ Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, 25 - 27 April 2015.

sedangkan sisanya masih dalam kepemilikan dan penguasaan masyarakat hukum adat Suku Tolaki.²⁵

Berbeda Desa Padangguni, Desa Anggoro memiliki wilayah yang lebih luas yakni 350 ha, dengan komposisi $\pm 60\%$ tanah persawahan, $\pm 20\%$ kebun rakyat, $\pm 10\%$ hutan rimba, dan sisanya $\pm 10\%$ adalah tanah pekarangan dan bangunan, atau diketahui ± 210 Ha tanah sawah, ± 70 Ha tanah yang diperuntukkan sebagai kebun rakyat, ± 35 Ha hutan rimba dan ± 35 Ha tanah pekarangan dan bangunan.²⁶

Tidak berbeda dengan tanah ulayat yang terdapat di Desa Padangguni, tanah ulayat yang terdapat di Desa Anggoro pada umumnya diperoleh/dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki sebagai harta peninggalan nenek moyang mereka.

Desa Anggoro berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, diketahui dari keseluruhan luas wilayah Desa Anggoro 20% tanah Negara dan 80% tanah ulayat. Karena alasan tersebut, ditetapkanlah Desa Anggoro sebagai daerah tujuan transmigrasi setelah Desa Padangguni.²⁷

Saat ini di Desa Anggoro, banyak ditemukan Suku Bugis yang membeli tanah kepada masyarakat hukum adat Suku Tolaki, yang menetap di daerah tanah Negara yang ditetapkan sebagai daerah transmigrasi dan memiliki tanah di wilayah hak ulayat dengan cara jual beli yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki dengan Suku Bugis melalui perjanjian di bawah tangan.

Dari keseluruhan luas wilayah tanah ulayat yang berada di Desa Anggoro diketahui hingga $\pm 85\%$ telah dimiliki oleh Suku Bugis, tanah tersebut berupa tanah sawah (*o galu*), tanah ladang (*waworaha*), sedangkan sisanya seluas $\pm 15\%$ tetap dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, yang dikerjakan oleh Suku Bugis dengan sistem sewa atau sistem bagi hasil.²⁸

²⁵ Hasil Wawancara dengan Pu`utobu, Ketua Adat, 25 - 27 April 2015.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Pu`utobu, Ketua Adat, 25 - 27 April 2015.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Pu`utobu, Ketua Adat, 25-27 April 2015.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Pu`utobu, Ketua Adat, 25- 27 April 2015.

Atas 80% tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, diketahui 15%-20% diambil oleh Pemerintah secara sepihak guna suksesi program transmigrasi, dan 45% dari keseluruhan tanah ulayat dijual kepada Suku Bugis oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, sedangkan sisanya tetap dikuasai oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki.²⁹

Selain terjadinya perubahan fungsi tanah dan kepemilikan, terdapat pula perubahan cara klaim atas tanah yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat Suku Tolaki. Pada jaman dahulu klaim tanah dikuatkan dengan bukti berupa jenis tanaman yang ditanam, bekas dan tanda perladangan yang sengaja dibuat atau ditinggalkan, kuburan nenek moyang dan lain sebagainya. Pada saat ini, klaim atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki dilakukan dengan mendaftarkan tanah yang dimilikinya di Kantor Pertanahan setempat, sehingga diperoleh sertifikat hak milik.

3. Hukum Adat

Masyarakat hukum adat Suku Tolaki, sejak mengenal uang, juga telah mengenal istilah jual beli, khususnya jual beli tanah (*meoli wuta*), dengan jual beli (*meoli wuta*) tersebut satu pihak menyerahkan tanah yang dijualnya dan pihak lain selaku pembeli menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati.

Terdapat beberapa jenis jual beli yang dikenal oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, berupa jual beli lepas atau kontan (*meoli nggonda*), jual beli gadai (*meoli mepoindi*) dan jual beli bersyarat (*meoli sara*), sedangkan berdasarkan jenis objeknya, dikenal jual beli rumah beserta areal tanah (*meoli laika*), jual beli kebun kelapa (*meoli lalonggaluku*), jual beli pekarangan rumah (*meoli lalondawaro*) dan lain sebagainya.

Terdapat beberapa syarat yang dapat terlaksanannya jual beli atas tanah tersebut, yaitu 1). Jual beli tanah harus dengan ijin *puutobu* dan *toonno motuo* setempat; 2). Transaksi harus dilakukan di depan *puutobu* dan wakil dari pemerintah formal setempat (kepala desa/camat).

²⁹

Hasil observasi dan wawancara dengan Camat Kec. Abuki, 25 Mei 2015.

Sehingga dengan demikian maka segala peralihan yang terjadi atas tanah ulayat tersebut haruslah dengan sepengetahuan dan persetujuan *toono motuo* dan *puutobu*, yang baik kedalam maupun keluar memiliki wewenang untuk mempertahankan keberadaan hak ulayat, berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah ulayat (hubungan hukum, peruntukan tanah ulayat dan lain sebagainya).

Terdapat sanksi atas pelanggaran tersebut, sanksi dapat berupa denda (*mosehe*) dan pengucilan/pengasingan (*ine uko ako*), yang dijatuhkan oleh *puutobu* setelah dilakukan perundingan di antara *puutobu*, *toono motuo*, keluarga *lia sara* (pelanggar hukum adat) yang dituakan. Terdapat asas umum yang dikenal oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, berkaitan dengan pelanggaran hukum adat menurutnya “*inae kona sara iye pinesara, inae lia sara ieto pinekasara*”, artinya barang siapa mentaati atau menjunjung tinggi hukum adat maka akan diperlakukan dengan baik/adil, dan barang siapa yang melanggar hukum maka akan dihukum atau diberi ganjaran.

Sebagaimana *sara ine wuta* (hukum adat pertanahan orang Tolaki), *larangan* menjual tersebut merupakan hukum adat yang sifatnya tidak tertulis, yang semestinya mengikat kepada setiap masyarakat hukum adat Suku Tolaki, namun dalam kenyataannya diketahui bahwa, segala bentuk peralihan atas tanah ulayat (khususnya jual beli lepas atau tunai (*meoli nggonda*) yang berada di Desa Padangguni dan Desa Anggoro, dilakukan oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemangku adat (*toono motuolpuutobu*). Bahkan tanah tersebut dijual oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki kepada masyarakat non Suku Tolaki.³⁰

Selain penyimpangan sebagaimana tersebut di atas, ditemukan pula bentuk penyimpangan lain atas tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki. Secara prinsip menurut ketentuan hak ulayat pada umumnya, tanah yang telah dibiarkan/ditinggalkan/ diterlantarkan oleh seseorang hingga kembali menjadi hutan atau tumbuh semak belukar,

³⁰ Hasil Wawancara dengan Pu`utobu, Ketua Adat, 25-27 April 2015.

akan mengakibatkan hilangnya hak atas tanah yang dimiliki perseorangan tersebut, dan bagi anggota masyarakat hukum adat lainnya dapat secara sah menguasai tanah tersebut.³¹

Berbeda dengan tanah ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki, tidak mengenal istilah tanah kembali menjadi tanah ulayat, sehingga tanah yang telah ditinggalkan sekian lama hingga 9 tahun lamanya atau hingga tanah tersebut kembali membelukar/kembali ditumbuhi pohon yang cukup besar/tinggi tidak serta merta menjadi tanah kosong/tanah tak bertuan/tanah ulayat.

Tanah tersebut tetap diakui menjadi milik anggota masyarakat hukum adat yang membuka lahan untuk pertama kali dan ahli warisnya, atas kondisi tersebut, dengan kata lain maka dalam perkembangannya tidak lagi dikenal istilah tanah hak milik perseorangan (*wutano laa ombuno*) di atas tanah hak ulayat (*wutano unapo*).

Simpulan

1. Di Desa Anggoro Kecamatan Abuki dan Desa Padangguni Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara terdapat hak ulayat, menurut perspektif terpenuhinya unsur-unsur eksistensi hak ulayat, terdapat masyarakat hukum adat yang dikenal dengan Suku Tolaki (unsur subjek hak ulayat), yang mendiami tanah ulayat yang dikenal dengan *wutano onapo/wutano toono dadio* atau yang oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) disebut dengan tanah ulayat (unsur objek hak ulayat). Keberadaan tanah tersebut diatur oleh hukum adat pertanahan, yang oleh masyarakat hukum adat Suku Tolaki dikenal dengan *sara ine wuta* (hukum adat pertanahan) yang bersumber pada *Kalo Sara*, guna mengatur pelaksanaan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat Suku Tolaki (unsur instrumen hak ulayat).
2. Masyarakat hukum adat Suku Tolaki tidak lagi berhak atas tanah ulayat yang terdapat di Desa Padangguni Kecamatan Padangguni dan Desa Anggoro Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara, yang

³¹ Boedi Harsono, **Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasannya**, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 188.

disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagai syarat pengakuan atas eksistensi hak ulayat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bakri, Muhammad, 2011, **Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria)**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.
- Darmodiharjo, Darji, Shidarta. 2002. **Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haar, Ter, 2013, **Asas-asas dan Susunan Hukum Adat** (terjemahan Soebakti Pesponoto), Balai Pustaka, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1983, **Sejarah Hukum Adat Indonesia**, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2008, **Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasan**, Djambatan, Jakarta.
- Kansil, Christine S.T., 2011, **Pengantar Ilmu Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta.
- Koodoh, Erens E, Abdul Alim, Bachruddin, 2011, **Hukum Adat Orang Tolaki**, Teras, Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono, 2012, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta.